BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Sejak masa penjajahan belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah terkenal suatu badan atau perusahaan yang telah menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah daerah otonomi (GEMENTE) maupun swasta maupun patungan antara pemerintah maupun swasta.

Di Jawa Barat (khususnya Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenga listrik untuk kepentingan umum yaitu Bandoengsche Electrictiet Maatschappj (BEM). Yang berdiri pada tahun 1905 pada tanggal 1 januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan GEMEN Schaplijk Elektrictiet Bedrijt Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM denaga akte pendirian notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuishen No.213 tanggal 31 Desember.

MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada masa penjajahan (1942-1945) pendistribusian tenaga listrik dilakukan oleh Djawa Denki Djigyo sha Bandoeng shi sha dengan wilayah kerja di seluruh pulau Jawa.

SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia mengalami Periode perjuangan fisik sampai tibanya saatnya penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia, karena pada tahun tersebut di mulai adanya nasiolisasi perusahaan asing Indonesia. Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan oleh peraturan pemerintah no. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkaan peraturan pemerintah no 67 tahun 1961 dibentuk badan pimpinan umum perusahaan listrik negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN.Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama Exploitas XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jaawa Barat kecuali DKI Jaya daan Tanggerang.

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara, menyebutkan bahwa perusahaan umum listrik.Berdasarkan peraturan mentri PUTL No.013/PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan umum listrik,maka PLN akan mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah .Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi peerusahaan umum listrik negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah RI No. 23 tahun 1984 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum listrik negara menjadi perusahan perseroan (Persero),maka bentuk perusahaan umum listrik negara Distribusi Jawa Barat menjadi perusahan perseroan dengan sebutan P.T PLN (Peersero) Distribusi Jawa Barat sejak taanggal 30 Juni 1994 sesuai akte pendirian.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisaasi P.T PLN (Peersero)Distribusi Jawa Barat teerdiri atas :

1. Unsur pimpinan adalah pemimpin Distribusi.
2. Unsur – unsur pembantu pimpinan adalah :

a) Bidang perencanaan

b) Bidang kontruksi

c) Bidang pengusahaan

d) Bidang keuangaan

e) Bidang kepegawaian dan administrasi

3. Unsur pelaksana adalah :

a) Cabang

b) Unit pengatur Distribusi

c) Unsur pengawasan adalah kontrol intern

2.3 Job Description

PEMIMPIN

Pemimpin mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pemimpin mengurus dan mengelola Distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari distribusi.
- Menguasai, memelihara daan megurus kekayaan distribusi.
- Mewakili distribusi didalam dan diluar pengadilan .
- Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan distribusi lengkap dengan anggaraan keuangaan .

- Menetapkan gaji pensiun atau jaminan hari tua dan pengahasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan kebijaksanan distribusi dibidang perencanan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik dan sumber daya manusia.
- Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan distribusi berdasarkan kebijaksanan direksi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengendalikan kegiatan – kegiatan lainya dengan persetujuan direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik.
- Mengendalikan pelaksana deputi pemimpin daan kepala kontrol intern.

DEPUTI PEMIMPIN BIDANG PERENCANAN

Tugas pokok bidang perencanaan adalah merumuskan rencana korporat distribusi, pengembangaan sistem pendistribusian tenaga listrik kebutuhan investasi, penyajian data dan informasi serta melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja distribusi

.DEPUTI BIDANG PEMIMPIN KONTRUKSI

Tugas pokok bidang penguasaan adalah merencanakan, mengendalikan dan membina pengoperasian dan pemeliharaan saran perindistribusian tenaga listrik pelayanan kepada pelanggan listrik danlistrik pedesaan.

DEPUTI PIMPINAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI

Tugas pokok bidang kepegawaian dan administrasi adalah melaksanakan kegiatan dalam sumber daya manusia admnistrasi umum, serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat.

DEPUTI PIMPINAN BIDANG KEUANGAN

Tugas pokok bidang keuangan adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keungan dan akuntansi pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana perindistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuanganya.

2.4 ASPEK - ASPEK KEGIATAN PERUSAHAAN

Berdasarkan peraturan pemerintah no.17 tahun 1990 tanggal 20 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan (2) sifat usaha PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip- prinsip pengolahan PLN.

Maksud didirikan PLN adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah yang memadai dengan tujuan untuk :

1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan mer ata serta mendorong kegiatan ekonomi.
2) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyedaan listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha dalam penyediaan tenaga listrik yang belum di laksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
4) Penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM